



**DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP**

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Periode 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis, kondisi pencapaian, permasalahan dan tantangan, visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi, program dan kegiatan, serta indikasi pendanaan. Renstra ini berfungsi sebagai petunjuk sekaligus penentu arah kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, serta menjadi alat ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Disadari bahwa Renstra yang disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan adanya masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna penyempurnaan dokumen ini. Akhirnya, dengan penuh hormat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengemban tugas pembangunan di Kabupaten Sigi yang kita cintai bersama. Amin.

“Kabupaten Sigi Maju, Berkelanjutan Berbasis Pertanian dan Pariwisata”

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	56
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DLH Kab. Sigi tahun 2025-2029	56
3.2. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029	62
3.3. Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029	64
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi tahun 2025-2029	69
4.2. Uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi 2025-2029	107
4.3. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	152
4.4.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).	156
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.....	158

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 160

BAB V PENUTUP 163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab Sigi	6
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi.....	26
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi Berdasarkan Pangkat Golongan.....	27
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi.....	28
Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi	29
Berdasarkan Pendidikan Teknis Lingkungan Hidup	29
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup	30
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi	38
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi	39
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024.....	43
Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi	50
Tabel 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SIGI TAHUN 2025-2030	57
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2026 - 2030	63
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....	65
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	70
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.....	108
Tabel 4.3 Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi	147
Tabel 4.4 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah PD Tahun 2025-2029.....	152

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030	157
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030	159
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029	160

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sigi untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Renstra ini menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam periode lima tahunan.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025–2029. Pelaksanaan pembangunan daerah selama periode tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan jangka panjang yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2045. Renstra ini disusun berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterpaduan dengan dokumen perencanaan lain di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan salah satu unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta pemantauan kegiatan yang memiliki izin lingkungan.

Sejalan dengan visi Kabupaten Sigi dalam RPJMD Tahun 2025–2029, upaya menjaga kualitas lingkungan menjadi prioritas penting mengingat berbagai tantangan, seperti peningkatan timbulan sampah, pencemaran air, penurunan kualitas udara, dan dampak perubahan iklim. Renstra ini menjadi pedoman pelaksanaan program selama lima tahun untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah tersebut, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lebih rasional, operasional, dan akuntabel, penyusunan Renstra PD Tahun 2025–2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamis.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra PD ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan daerah, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Penyusunan Renstra PD; serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik m` 1781).
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Laksana dan Standar Pelayanan Minimal Urusan Lingkungan Hidup.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sigi Tahun 2025–2045.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, khususnya program prioritas daerah di bidang lingkungan hidup selama lima

tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini adalah untuk:

1. Menyelaraskan perencanaan pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sigi.
2. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja PD tahunan.
3. Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja perangkat daerah.
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sigi.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
6. Menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran program lingkungan.
7. Meningkatkan efektivitas pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sigi.
8. Memastikan keterpaduan pelaksanaan dengan perangkat daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat.
9. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah sebagai penjabaran teknis RPJMD sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing.
10. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD sebagai perencanaan tahunan yang memuat program, target, dan pagu indikatif, untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 terdiri atas:

- **BAB I PENDAHULUAN**
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
- **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**
- **BAB V PENUTUP**

BAB II

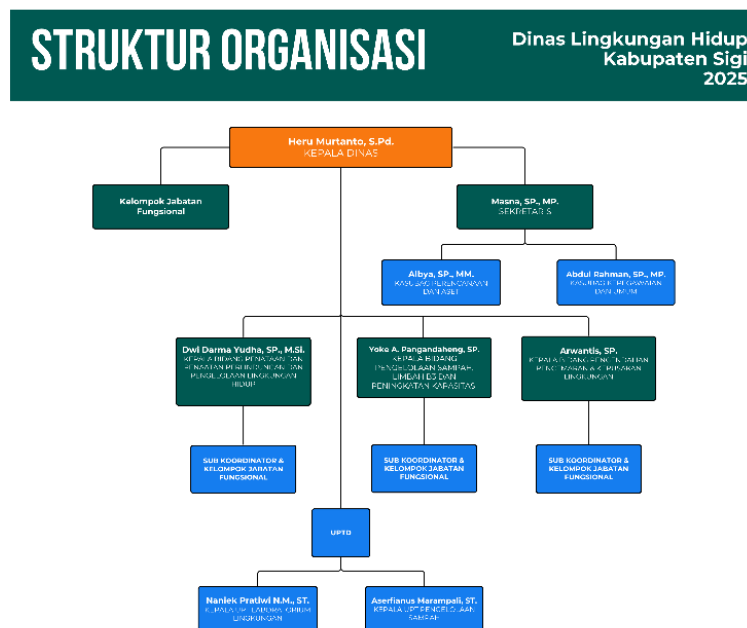
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Perangkat Daerah terkait sampai *stakeholder* lain yang berperan dalam pembangunan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi memiliki sumberdaya yang minim tetapi handal dalam pelayanannya, dengan dukungan dari tim terpadu dalam menjalankan pengawasan kerusakan lingkungan. Keberhasilan program dan kegiatan di tahun sebelumnya tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dengan tim terpadu yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, TNI dan Polri, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Kegakum Lingkungan dimana membuahkan hasil yang baik dengan berkurangnya kerusakan lingkungan akibat usaha dan kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab Sigi



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
3. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 - a) Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 - c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - a) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - c) Seksi Kerusakan Lingkungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau kewenangan secara optimal, dilakukan langkah-langkah serta upaya yang nyata dibarengi tersedianya tenaga pegawai yang handal dan profesional, sarana dan fasilitas, serta dukungan dana yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi sebagai lembaga pengelola lingkungan yang sangat dituntut perannya dalam artian melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sub bidang di Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Lingkungan Hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Lingkungan Hidup;
 - b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
 - c) Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - e) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - f) Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g) Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

● **Sub Bagian Pelaporan, Program Keuangan dan Aset**

- 1) Sub bagian Pelaporan, Program Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran dan penatausahaan aset serta pelaporan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Sub Bagian Pelaporan, Program Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- b) Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e) Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- f) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
- g) Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset;
- h) Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

● **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b) Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

- c) Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d) Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e) Fasilitas penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup.
- f) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g) Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- 1) Bidang Penataan dan Pnaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pnaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Bidang Penataan dan Pnaatan (PPLH) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penataan dan pnaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - b) Pemberian petunjuk teknis di bidang penataan dan pnaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penataan dan pnaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang penataan dan penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penataan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(1)Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

- 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
 - b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
 - d) Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e) Penyiapan bahan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto & produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g) Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA), lingkungan hidup dan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLDH) serta penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- h) Penyiapan pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- i) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
- j) Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- k) Penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- l) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, isin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- m) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- n) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- d) Penyiapan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- f) Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g) Penyiapan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h) Penyiapan bahan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- j) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

- 1) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan;
 - b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang penegakan hukum lingkungan;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan;
 - d) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - e) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - f) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - g) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - h) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - j) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - k) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum lingkungan;
 - l) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan;

- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas.

- 1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.
 - b) Pemberian petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.
 - c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.
 - d) Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas.
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(1) Seksi Pengolahan Sampah

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sampah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan sampah;
 - b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengelolaan sampah;
 - d) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - e) Penyiapan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen atau industri;
 - f) Penyiapan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g) Penyiapan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - h) Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i) Penyiapan bahan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - j) Penyiapan bahan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;

- k) Penyiapan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- l) Penyiapan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- m) Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten atau kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- n) Penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah;
- p) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah;
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

- 1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, 235 pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu Daerah Kabupaten;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu Daerah Kabupaten;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengumpulan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
- i) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- j) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- 2) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), penetapan tanah ulayat, kearifan lokal atau verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f) Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA);
- g) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan dan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- i) Penyiapan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j) Penyiapan model, sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- k) Penyiapan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- l) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- m) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH)

- 1) Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b) Pemberian petunjuk teknis di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(1) Seksi Pencemaran Lingkungan

- 1) Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Pencemaran Lingkungan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Seksi Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pencemaran lingkungan;
 - b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pencemaran lingkungan;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencemaran lingkungan;

- d) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi serta pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
- e) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi serta pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i) Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencemaran lingkungan;
- k) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencemaran lingkungan;
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

- 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - d) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
 - e) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - f) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - g) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
 - h) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - i) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- 1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- b) Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- d) Penyiapan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam ;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi;
- h) Penyiapan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i) Penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- j) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- l) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.kriteria baku kerusakan lingkungan;

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai keahlian dan kebutuhan.
2. Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang telah ditetapkan, kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi saat ini diuraikan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Jumlah aparatur sebanyak orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi

o	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15	10	25
	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	2	2	4
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	28	9	37
	PPPK paruh waktu	13	3	16

	Tenaga Kontrak	1	1	2
	Penjaga Kantor	1	-	1
	Penjaga TPA	2	-	2
	Penjaga RTH Taiganja	1	-	1
	Total	63	25	88

Pada Tabel 2.1 berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 88 orang, yang terdiri dari 63 orang laki-laki atau dengan persentase 71,6% dan 22 orang perempuan atau dengan persentase 28,4%. Komposisi ini menunjukkan bahwa pegawai di lingkungan DLH Kabupaten Sigi didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV			
	IV/d	-	-	-
	IV/c	1	-	1
	IV/b	-	1	1
	IV/a	5	-	5
2	Golongan III			
	III/d	2	3	5

	III/c	1	2	3
	III/b	4	1	5
	III/a	4	4	8
3	Golongan IX	3	6	9
4	Golongan VIII	1	-	1
5	Golongan V	23	4	27
	Total	44	21	65

Pada Tabel 2.2, Golongan V merupakan status kepegawaian yang paling dominan yaitu sebanyak 27 orang dari total pegawai berdasarkan pangkat golongan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tahap awal karir. Status kepegawaian kedua yang dominan yaitu golongan III yaitu sebanyak 21 orang dari total pegawai, yang menunjukkan sebagian pegawai berada pada tahap menengah karir. Mayoritas pegawai pada golongan III berada di golongan III/a. Status kepegawaian selanjutnya yaitu golongan IX yaitu sebanyak 9 orang dari total pegawai, dimana golongan ini merupakan pegawai PPPK. Status kepegawaian berikutnya yaitu golongan IV sebanyak 7 orang dari total pegawai, dengan mayoritas pegawai pada golongan IV/a. Status kepegawaian terakhir yaitu golongan VIII terdiri dari 1 orang pegawai dari total pegawai.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		CPNS		PPPK		Paruh Waktu		Non ASN		Jumlah (Orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	

1	S-2	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9
2	S-1	9	5	2	2	3	6	1	-	-	1	29
3	D-3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
4	SMA Sederajat	1	1	-	-	23	4	11	3	-	-	43
5	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	SD Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

Pada tabel 2.3, mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan 1 orang berpendidikan diploma 3 (D-3), 29 orang berpendidikan sarjana (S-1) dan 9 orang telah melanjutkan ke jenjang pascasarjana (S-2). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi telah mencapai tingkat pendidikan tinggi dan memiliki keunggulan dalam keterampilan teknis, pengetahuan dan analisa serta kemampuan dalam pengembangan dan pengambilan keputusan-keputusan strategis. Sedangkan pendidikan menengah dan vokasi mencakup 45 orang yang dimana dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas DLH Kabupaten Sigi dalam mengembangkan keterampilan teknis dan praktis untuk melaksanakan program-program pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan berkelanjutan.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sigi
Berdasarkan Pendidikan Teknis Lingkungan Hidup

No	Teknis Lingkungan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
----	----------------------	-----------	-----------	-------------------

1	Amdal	3	-	3
---	-------	---	---	---

Pada tabel 2.4, berdasarkan pendidikan teknis lingkungan hidup, sebanyak 3 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi merupakan teknisi lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu suatu proses evaluasi yang sistematis dan komprehensif untuk mengidentifikasi dan memprediksi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari suatu proyek atau kegiatan.

b. Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi saat ini telah tersedia sarana dan prasarana kerja seperti terlihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	KONDISI BARANG
1	Sepeda Motor	17	Baik
2.	Kendaraan Roda Empat	3	Baik
3.	Dump Truck	5 1	Baik Rusak
3.	Kendaraan Roda Tiga	8	Baik
4.	Stationary Generating Set	1	Baik
5.	Bak Kontainer Sampah	22	Baik
6.	Gerobak Tarik	1	Rusak Berat

7.	GPS	5	Baik
8.	Timbangan Elektronik	4	Baik
9.	Alat Lubang Biopori	30	Rusak Berat (Hilang Pasca Bencana)
10.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Rusak Berat
11.	Alat Laboratorium	18	Baik
12.	Mesin Ketik	2	Rusak Berat
13.	Mesin Calculator	1	Rusak Berat
14.	Mesin Foto Copy	1	Rusak Berat
15.	Lemari Besi	4 2	Baik Rusak Berat
16.	Filling Besi	4 1	Baik Rusak Berat
17.	Brand Kas	1 1	Rusak Rusak Berat (Hilang Pasca Bencana)
18.	Lemari Kaca	1	Rusak Berat
19.	Lemari Kayu	1	Rusak Berat
20.	Papan Visuil	2 1 1	Baik Rusak Ringa Rusak Berat

21.	Papan Nama Instansi	15 1	Rusak Rusak Berat
22.	Papan Pengumuman	96	Rusak
23.	White Board	4	Rusak Berat (Hilang Pasca bencana)
24.	Mesin Absensi	2	Baik

25.	Mesin Pompa	1 1	Baik Hilang Pasca Bencana
26.	Lemari Kayu	3	Rusak
27.	Kursi Putar	1	Rusak Berat
28.	Kursi Lipat	41 28	Baik Rusak Berat (Hilang Pasca Bencana)
29.	Meja Komputer	1 5	Baik Rusak Berat
30.	Tenda	1	Rusak Berat
31.	Meja Biro	16 10	Baik Rusak Berat
32.	Sofa	1	Baik
33.	Kursi Plastik	1 7	Baik Hilang Pasca Bencana
34.	Gordyn	2 2	Baik Hilang Pasca Bencana

35.	Rak TV	1	Rusak Berat
36.	Karpet	1	Baik
37.	Teralis Besi	16	Hilang Pasca Bencana
38.	Mesin Potong Rumput	11 1 1	Baik Rusak Berat Hilang Pasca Bencana
39.	Artco	1 2	Baik Hilang Pasca bencana
40.	<i>AC Unit</i>	5	Rusak Berat (Hilang Pasca Bencana)
41.	<i>AC Split</i>	8 2	Baik Rusak Berat
42.	Kipas Angin	1 4 1	Baik Rusak Berat Hilang Pasca bencana
43.	<i>Exhaust Fan</i>	2	Rusak
44.	Dispenser	2 1	Baik Rusak Ringan
45.	Televisi	1 3	Rusak Berat Hilang Pasca Bencana
46.	<i>Wireless</i>	2	Hilang Pasca bencana
47.	<i>Uni Power Supply</i>	1	Rusak
48.	Camera Video	2	Baik

49.	Camera Video	2	Baik
50.	Camera Film	2	Rusak Berat
51.	<i>Handy Cam</i>	1	Rusak Berat
52.	Tandon Air	1 1	Baik Rusak Berat
52.	Lampu Emergency	1	Rusak Berat
53.	Internet (Modem)	2	Hilang Pasca Bencana
54.	Komputer PC	10 5	Baik Rusak Berat

55.	Laptop	13 1 1	Baik Rusak Berat Hilang Pasca Bencana
56.	Note Book	4	Baik
57.	Printer	10	Baik
58.	Scanner	1	Baik
59.	UPS	7	Rusak Berat
60.	Stabilizer/Stavolt	4	Hilang Pasca Bencana
61.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik

62.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
63.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Baik
64.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	Baik
65.	Meja Kerja	7 6	Baik Rusak Berat
66.	Meja Rapat	1	Baik
67.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik
68.	Kursi Tamu	1	Baik
69.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	9 2	Baik Rusak Ringan
70.	Camera	3	Baik
71.	Proyektor	2	Baik
72.	Handy Talky	2 1	Rusak Ringan Rusak Berat
73.	Telex	1	Rusak Berat
74.	Facsimile	1	Rusak berat
75.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	2	Rusak Berat
76.	Wireless Amplifier	1	Baik

77.	Peralatan Antena MF/MW	1	Rusak Berat
78.	Combustion Tester	1	Baik
79.	Sepatu (International Safety Tester)	6	Rusak Berat
80.	Alat Ukur Sudut	1	Baik
81.	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	3 8	Baik Rusak Ringan
82.	Cooler Box	7	Baik
83.	Alat Lab. Biologi	24	Rusak Ringan
84.	Alat Box Compression Test	1	Baik
85.	Test Kit	1	Rusak
86.	Water Sample	24	Baik
87.	Current Meter	1	Baik
88.	Software Cont Off-line Computer	1	Rusak Berat
89.	Senter	6	Rusak Berat

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78.7	78.46	78.65	78.84	79.03	80.7	79.95	79.78	-	102.5	101.9	101.4	-
2	Persentase lahan kritis menurun	%	28	26	24	22	20	30	40	57	-	107	158	122	-

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	78.7	78.46	78.65	78.84	79.03	80.7	79.95	79.78	-	102.5	101.9	101.4	-
2	Penurunan intensitas emisi GRK	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

	per tahun														
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	33.50	35.75	37.05	39.36	41.33	31.97	35.78	20.22	-	95.432	100.1	54.57	
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	-	-	12.73	13.36	-	-	-	-	-	-	-	
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

8	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Km2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Persentase efektifitas tata kelola Pemerintahan Kecamatan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10	Terwujudnya penyelenggaraan Inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

	verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications														
11	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	-	-	-	4393.35	4613.02	-	-	-	-	-	-	-	
12	Persentase Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	%	28	26	24	22	-	30	40.62	57	-	107.14	156.23	122	-
13	Persentase Peningkatan sampah yang	%	33.50	35.75	37.05	39.36	41.33	31.97	35.78	20.22	-	95.432	100.1	54.57	

dikelolah di TPA/TPST Regional														
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.)				Persentase Realisasi Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	4,143,682,165.00	3,989,598,876.00	3,940,130,543.00	2,730,543,299.00	3,942,985,380.00	3,837,752,355.00	3,699,335,638.00	2,649,430,127.00	95.16%	96.19%	93.89%	97.03%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	309,865,582.00				305,510,362.00				98.59%			
3	Program Pengendalian Pencemar Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50,000,000.00	50,000,000.00	589,600,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	375,249,910.00		100.00%	100.00%	63.64%	

4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1,631,830,000.00				1,544,327,310.00				94.64%			
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		1,026,637,300.00	119,891,186.00	74,618,000.00		1,007,854,927.00	119,891,186.00	74,450,000.00		98.17%	100.00%	99.77%
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			432,100,000.00	4,641,512,975.00			358,576,750.00	2,598,011,419.00			82.98%	55.97%
7	Program Pengelolaan Persampahan	1,150,000,000.00	1,173,843,050.00	1,246,325,200.00	97,902,000.00	1,098,108,000.00	1,127,986,374.00	1,190,096,436.00	97,901,500.00	95.49%	96.09%	95.49%	100.00%

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan yang berhubungan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi :

1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)

Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis dokumen perencanaan dan hasil kajian pembangunan daerah.

2. Perangkat Daerah Kabupaten Sigi

Sebagai pengguna utama dokumen perencanaan dan data hasil evaluasi pembangunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Sekolah

Sekolah memiliki fungsi ganda yakni sebagai pusat pendidikan dan agen perubahan perilaku sehingga sekolah berperan tidak hanya sebatas tempat belajar, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan perilaku lingkungan hidup menuju masyarakat yang lebih peduli, berbudaya dan berkelanjutan.

4. Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan dan sumber daya alam secara lestari, sehingga berperan penting dalam konservasi, mitigasi perubahan iklim, serta pemberdayaan ekonomi hijau berbasis potensi lokal.

5. Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra dalam advokasi, edukasi, riset dan pendampingan masyarakat sehingga mampu memperkuat partisipasi publik, mendukung konservasi serta membantu mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

6. Masyarakat Umum

Berperan langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi pencemaran, dan mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

7. Instansi Vertikal dan Mitra Pembangunan

Sebagai pendukung kebijakan, pembinaan. Pendanaan serta inovasi sehingga memperkuat sinergi dan percepatan pencapaian program lingkungan hidup berkelanjutan.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sigi, maka tugas Dinas Lingkungan Hidup semakin luas serta penuh dengan tanggung jawab.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, maka kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam

bidang tugasnya. Untuk itu, kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan hidup adalah:

1. Masih rendahnya ketaatan bagi pelaku usaha untuk menurunkan beban pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha;
1. Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan persampahan;
2. Masih rendahnya SDM dan jumlah tenaga pengelola sampah di lapangan serta sarana dan prasarana pengolah sampah di TPA;
3. Masih rendahnya keterlibatan kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dalam perwujudan Insentif Ekologi (TAKE);
4. Belum tersedianya bibit tanaman varietas unggul;
5. Belum tersedianya sarana dan prasarana perwujudan kebun raya sigi;
6. Masih banyaknya deforestasi atau penggundulan hutan;
7. Belum maksimalnya pengelolaan lingkungan dalam upaya pencegahan perubahan iklim;
8. Adanya Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah tersebut. Dalam hal ini, karakteristik isu strategis meliputi pernyataan penting, mendasar dan mendesak terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi dalam periode perencanaan lima tahun kedepan. Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi diidentifikasi berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan dinamis yang relevan dengan perangkat daerah mulai dari tingkat global, nasional dan regional, juga keterkaitannya dengan dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya, diantaranya Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

Pertama, Transformasi ekonomi inklusi berbasis pertanian dan keanekaragaman hayati Sigi sebagai lumbung pangan. Kabupaten Sigi memiliki keunggulan komparatif berupa lahan pertanian yang subur serta keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk potensi flora dan fauna endemik. Kondisi ini menjadi modal strategis untuk mendorong transformasi ekonomi yg inklusif berbasis pertanian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Namun tantangan masih dihadapi, misalnya keterbatasan infrastruktur, akses pasar dan pengelolaan pangan berkelanjutan. Isu KLHS yang relevan adalah keseimbangan antara peningkatan produksi pangan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Secara nasional arah RPJMD 2025 - 2029 menekankan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sedangkan pada tingkat regional dibutuhkan kolaborasi

antar daerah dalam mendukung Sigi sebagai lumbung pangan Sulawesi Tengah.

Kedua, Penguatan tata kelola wilayah yang berkelanjutan untuk menjaga fungsi lumbung pangan dan keanekaragaman hayati dari ancaman ekstraktif. Aktivitas seperti pertambangan, alih fungsi lahan dan perluasan perkebunan berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan, merusak ekosistem serta mengganggu ketahanan pangan Kabupaten Sigi. Hal ini terkait dengan isu KLHS pentingnya memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan melalui penerapan instrumen tata kelola yang kuat. Arah RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya ketahanan pangan, pengendalian degradasi lingkungan, serta penguatan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada tingkat regional, Sulawesi Tengah menghadapi tantangan besar terkait pengendalian kegiatan ekstraktif di kawasan pertanian dan konservasi, sehingga dibutuhkan sinergi lintas daerah dalam menjaga fungsi ekologis dan keberlanjutan pembangunan.

Ketiga, Transformasi ekonomi inklusif berbasis pertanian dan keanekaragaman hayati menjadi isu strategis daerah, di mana pengembangan agrowisata berbasis pertanian organik berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan utama yang muncul adalah degradasi lahan akibat praktik pertanian konvensional baik berupa

pencemaran tanah dan air akibat pestisida / limbah pertanian, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengelolaan berkelanjutan. Isu KLHS yang relevan adalah degradasi lahan ;pertanian. Hal ini sejalan dengan isu lingkungan nasional yang dinamis, seperti penurunan kualitas lahan produktif, ancaman krisis pangan, alih fungsi kawasan lindung, serta dampak perubahan iklim, sehingga pengembangan agrowisata organik menjadi solusi integratif yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

Keempat, Penguatan tata kelola wilayah yang berkelanjutan untuk menjaga fungsi lumbung pangan dan keanekaragaman Di Kabupaten Sigi, tantangan semakin kompleks karena kondisi wilayah yang rawan bencana memengaruhi keberlanjutan lahan pertanian, sementara upaya rehabilitasi lahan pasca bencana masih terbatas. Isu KLHS yang relevan adalah tingginya kerentanan lingkungan terhadap bencana, yang menuntut perencanaan wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini sejalan dengan isu lingkungan nasional yang dinamis, yaitu penguatan mitigasi bencana berbasis ekosistem untuk menjaga ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Pada level regional, persoalan semakin diperparah oleh menurunnya vegetasi penahan erosi di lereng-lereng gunung di Sigi, sehingga diperlukan strategi pengelolaan lahan dan pemulihan ekosistem yang terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kelima adalah peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berkelanjutan melalui pengembangan bank sampah, TPS 3R, penerapan teknologi ramah lingkungan di TPA, serta partisipasi masyarakat. Isu KLHS yang relevan yaitu pencemaran tanah, air, dan udara akibat sampah serta perlunya pengelolaan terpadu berbasis 3R. Hal ini sejalan dengan isu nasional target pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% (Perpres 97/2017) serta penghapusan plastik sekali pakai, dan pada level regional didukung Perda Provinsi Sulawesi Tengah serta kebijakan TPA regional sehingga sinergi lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah

Keenam, -Peningkatan kualitas evaluasi & pengawasan dokumen lingkungan,digitalisasi perizinan lingkungan (Amdalnet) dan penegakan hukum

lingkungan serta peningkatan kapasitas SDM pengendali dampak lingkungan. Potensi kewenangan DLH meliputi evaluasi AMDAL/UKL-UPL, pemantauan RKL-RPL, dan pengawasan kegiatan berizin, namun terkendala rendahnya kualitas dokumen, lemahnya pelaksanaan RKL-RPL oleh pemrakarsa, serta keterbatasan SDM dan anggaran. Isu KLHS yang terkait adalah menurunnya kualitas dokumen lingkungan dan lemahnya implementasi pengelolaan, selaras dengan isu nasional implementasi OSS-RBA, arahan RPJMN terkait daya dukung–daya tampung, serta digitalisasi dokumen melalui Amdalnet. Pada tingkat regional, tantangan diperkuat oleh isu daya dukung DAS Palu–Sigi, pencemaran sungai dan udara, serta pengendalian aktivitas tambang dan perkebunan di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sigi

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Lahan pertanian subur dan keanekaragaman hayati tinggi (flora-fauna endemik)	Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dan kerusakan habitat	Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Krisis pangan global akibat degradasi lahan dan kehilangan biodiversitas	Ketahanan pangan nasional, perlindungan keanekaragaman hayati	Perubahan penggunaan lahan dan fragmentasi habitat di Sigi	Transformasi ekonomi inklusi berbasis pertanian dan keanekaragaman hayati Sigi sebagai lumbung pangan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Sumber daya air melimpah dari kawasan pegunungan dan hutan lindung	Penurunan kualitas air akibat pencemaran limbah domestik dan pertambangan	Kerentanan ekosistem DAS dan penurunan kualitas air	Perubahan iklim yang mengganggu siklus hidrologi	Target penurunan emisi GRK dan SDGs	Kerusakan hutan dan daerah tangkapan air di Kabupaten Sigi	Penguatan tata kelola wilayah yang berkelanjutan untuk menjaga fungsi lumbung pangan dan keanekaragaman hayati dari ancaman ekstraktif
Potensi agrowisata berbasis pertanian organik	Pencemaran tanah dan air akibat pestisida/limbah pertanian	Degradasi lahan pertanian	Degradasi lahan secara global	Program pertanian berkelanjutan	Rendahnya penerapan pertanian ramah lingkungan	Transformasi ekonomi inklusif berbasis pertanian dan keanekaragaman hayati
Kawasan rawan bencana yang mempengaruhi lahan pertanian	Kerusakan lahan pasca bencana dan kurangnya rehabilitasi	Kerentanan lingkungan terhadap bencana	Peningkatan frekuensi bencana global akibat perubahan iklim	Penguatan mitigasi bencana berbasis ekosistem	Penurunan vegetasi penahan erosi di lereng pegunungan Sigi	Penguatan tata kelola wilayah yang berkelanjutan untuk menjaga fungsi lumbung pangan dan keanekaragaman hayati dari ancaman ekstraktif
TPA regional-Bank sampah-TPS 3R-Gerakan masyarakat peduli sampah	Timbulan sampah terus meningkat, Keterbatasan sarana/prasarana (armada, TPS), rendahnya kesadaran masyarakat memilah sampah,	Pencemaran tanah, air, udara akibat sampah, pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R	Isu circular economy & pengurangan plastik sekali pakai	Target nasional pengurangan sampah 30% & penanganan 70% tahun 2025 (Perpres 97/2017), penghapusan sampah plastik sekali pakai	Perda Provinsi tentang Pengelolaan Sampah, Kebijakan regional Sulawesi Tengah soal TPA regional	Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berkelanjutan, pengembangan bank sampah dan TPS 3R, penerapan teknologi ramah lingkungan di TPA, edukasi dan partisipasi masyarakat

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	pengelolaan TPA belum sanitary landfill					
Perizinan dan pengawasan meliputi kewenangan evaluasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, serta pengawasan terhadap kegiatan yang berizin lingkungan	Banyak dokumen lingkungan yang belum berkualitas, pemrakarsa sering tidak melaksanakan RKL-RPL dengan baik, serta terbatasnya SDM dan anggaran pengawasan.	Peningkatan kualitas dokumen lingkungan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Isu perubahan iklim & green investment-ESG (Environmental, Social, Governance) dalam investasi global	Implementasi OSS-RBA untuk perizinan lingkungan, arahan RPJMN mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebijakan KLHK tentang digitalisasi dokumen lingkungan melalui Amdalnet	Isu daya dukung lingkungan di DAS Palu-Sigi, kasus pencemaran sungai dan udara regional, serta pengendalian kegiatan tambang dan perkebunan di Sulawesi Tengah	Peningkatan kualitas evaluasi & pengawasan dokumen lingkungan, digitalisasi perizinan lingkungan (Amdalnet), penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas SDM pengendalian dampak lingkungan.

c. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai Daerah Otonom Baru dengan Luas 5.196,02 km² yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 desa dengan jumlah penduduk 270,189 jiwa, pembangunan di Kabupaten Sigi harus direncanakan dengan sebaik-baiknya serta dilakukan oleh orang-

orang yang profesional, ikhlas dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun. Bukan sebaliknya hanya mencari kesempatan demi kepentingan pribadi atau golongan yang akhirnya merusak masa depan Kabupaten Sigi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kabupaten Sigi, Membutuhkan Kerangka Berpikir yang komprehensif dan tepat untuk dijalankan secara sistematis oleh seluruh elemen masyarakat sehingga pembangunan di Kabupaten Sigi dapat tercapai sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Pada hakikatnya keseluruhan upaya pembangunan memiliki satu tujuan fundamental yang dituangkan dalam berbagai program dan kebijakan sesuai dengan visi dan misi Bupati Sigi yaitu **"SIGI MAJU, BERKELANJUTAN DAN BERBASIS PERTANIAN SERTA PARIWISATA"**.

Maju, memiliki makna dasar bergerak/berjalan ke depan. Sehingga secara umum dapat diartikan menunjukkan suatu pergerakan atau perkembangan ke arah yang lebih baik ke depan. Maju juga bisa merujuk pada adanya peningkatan kualitas atau kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang modern, menjunjung tinggi kearifan lokal, membangun sesuai karakteristik wilayah, mampu bersaing di kancah regional maupun nasional, memiliki ketahanan yang tangguh dalam mewujudkan masyarakat "masagena".

Berkelanjutan, dapat didefinisikan sebagai keadaan berkelanjutan yang terus menerus ada atau terjadi. Berkelanjutan dalam konteks yang lebih luas menekankan pada adanya kelangsungan yang berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan alam dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan hijau berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan infrastruktur, pertanian, pariwisata dan usaha Mikro (UMKM), yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan tetap mengedepankan pelayanan dasar, Pendidikan dan Kesehatan.

Pertanian, adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Lebih luas, pertanian juga mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan bercocok tanam.

Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan dan turisme. Secara lebih rinci, pariwisata bisa diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan rekreasi, hiburan, atau untuk memperluas pengetahuan.

Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang tumbuh dan berkembang dalam sektor pertanian dan pariwisata melalui peningkatan produktivitas inovasi teknologi pertanian dan peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata.

Maju, berkelanjutan dan berbasis pada pertanian serta pariwisata menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan Kesejahteraan. Maju dalam peningkatan kualitas hidup, dimana masyarakat memiliki akses ke fasilitas dan layanan yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; perekonomian daerah yang berkembang dengan adanya investasi, industri dan perdagangan yang maju, serta adopsi teknologi dan inovasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan lestari, juga lingkungan hidup yang dijaga dan dilestarikan untuk mendukung kehidupan yang sehat dan nyaman serta perekonomian daerah yang inklusif. Pertanian menjadi sektor utama yang dikembangkan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat dengan produk pertanian yang memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing di pasaran, sehingga dengan demikian petani diberdayakan untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan. Sektor utama lainnya yaitu pariwisata yang dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dengan layanan pariwisata yang memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan serta masyarakat lokal dapat diberdayakan untuk meningkatkan kemampuan melalui pariwisata.

Yang dijabarkan ke dalam Misi:

1. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur secara merata dan berkeadilan.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera.
3. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata.
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Merujuk dari Visi dan Misi Kabupaten Sigi tepatnya misi keempat yaitu mewujudkan kelestarian lingkungan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan harmoni sosial, maka Dinas Lingkungan Hidup menuangkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tujuan

- Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Indikator Kinerja Utama Tujuan/ Sasaran

- Penurunan Intensitas Emisi GRK.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DLH Kab. Sigi tahun 2025-2029**

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, maka perencanaan terintegrasi melalui desain kerangka berpikir logis sederhana dituangkan ke dalam rumusan Tujuan dan Sasaran tabel berikut

Tabel 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. SIGI TAHUN 2025-2030

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani -Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati -Menurunnya Intensitas GRK menuju Net Zero Emission	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Pengelolaan Sampah		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	Poin	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	
			Penurunan Intensitas Emisi GRK((%))	-	28	29,05	31	33	33,88	34	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%)	-	32	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33	
			Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) per tahun	-	565.655,11	632.143,26	709.986,93	798.376,67	884.431,12	980.969,4	

			(Ton CO2 eq)								
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	-	39,36	41,33	43,4	45,57	47,85	50,24	
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))	-	12,73	13,36	14,03	14,73	15,47	16,24	
		Meningkatnya Keanekaragaman Hayati yang Dikelolah.	Luas Kawasan situs penting keanekaragaman Hayati Pegunungan Dalam Kawasan Konservasi	-	0	0	0	0	0	0	

			(Km2)								
			Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (%)	-	22	20	25	30	35	40	
		Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Terwujudnya Penyelenggara n inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communication (Dokumen)	-	0	1	1	1	1	1	

		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Poin)	-	35	40	45	50	55	60	
			Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang (Ton)	-	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	
			Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelolah di TPA/TPS Regional (Persentase)	-	39	41	43	45	47	49	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan (%)	-	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Efektifitas Administrasi	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	-	B	B	B	BB	BB	BB	

		Kesekretariatan									
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

- 1). Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan
- 2). Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja yang dapat ditindaklanjuti. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD, maka dianggap strategis, perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Di samping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berikut uraian sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun
2026 -2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Melakukan pemetaan terhadap lahan kritis dan area hutan yang terdegradasi di Kabupaten Sigi. Menyusun rencana rehabilitasi dan konservasi hutan yang melibatkan pemangku kepentingan lokal, termasuk masyarakat adat dan kelompok masyarakat sekitar hutan.	Menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya konservasi hutan, teknik rehabilitasi lahan, serta cara pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk memastikan partisipasi aktif mereka dalam upaya pemulihan hutan.	Memulai kegiatan penanaman pohon secara masif di area lahan kritis dan hutan yang terdegradasi dengan melibatkan masyarakat lokal. Menggunakan tanaman lokal yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati.	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan, seperti membentuk kelompok pengelola hutan desa yang dapat mengelola sumber daya alam secara produktif dan ramah lingkungan	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan program rehabilitasi dan konservasi hutan, termasuk dampaknya terhadap pengurangan deforestasi dan degradasi lahan. Menyusun laporan evaluasi dan merencanakan upaya perbaikan serta penguatan kegiatan konservasi hutan secara berkelanjutan

Melakukan pemetaan terhadap kondisi pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Sigi, serta menyusun rencana strategis untuk pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk identifikasi lokasi yang membutuhkan fasilitas pengolahan sampah dan pengurangan sampah plastik	Menyelenggarakan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengurangan sampah plastik, daur ulang, dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara-cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan	Membangun fasilitas pengolahan sampah yang efisien, seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), pusat daur ulang, dan teknologi pengolahan sampah organik menjadi kompos. Memastikan fasilitas ini mudah diakses oleh masyarakat dan dapat mengolah sampah secara optimal	Mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan membentuk kelompok pengelola sampah di tingkat desa dan kelurahan. Menyediakan insentif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan daur ulang	Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan, serta dampaknya terhadap pengurangan polusi dan dampak lingkungan. Memperkuat jaringan daur ulang dengan kerjasama bersama industri daur ulang dan memperluas fasilitas pengolahan sampah untuk menciptakan ekonomi sirkular di Kabupaten Sigi.
--	--	--	---	---

3.3. Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Kebijakan ini diwujudkan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan efektivitas

pengelolaan persampahan dan limbah, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta pelestarian keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil.

Selain itu, arah kebijakan juga menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan efektivitas pemantauan dan evaluasi kinerja. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya target-target Renstra, seperti peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), perolehan penghargaan Adipura, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan yang mendukung terwujudnya Kabupaten Sigi sebagai daerah maju berbasis pertanian dan pariwisata.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
		Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan: Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan mengedukasi masyarakat tentang daur ulang dan pengurangan sampah plastik, serta membangun fasilitas pengolahan sampah yang efisien untuk mengurangi polusi dan dampak terhadap lingkungan	Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan: Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan mengedukasi masyarakat tentang daur ulang dan pengurangan sampah plastik, serta membangun fasilitas pengolahan sampah yang efisien untuk mengurangi polusi dan dampak terhadap lingkungan	

		Peningkatan Konservasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dengan Mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan konservasi, serta melibatkan masyarakat dalam program perlindungan spesies dan habitatnya melalui edukasi dan patroli bersama	Peningkatan Konservasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dengan Mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan konservasi, serta melibatkan masyarakat dalam program perlindungan spesies dan habitatnya melalui edukasi dan patroli bersama	
		Pengembangan Program Restorasi Ekosistem Melakukan restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan teknik berbasis teknologi, serta mendorong praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati	Pengembangan Program Restorasi Ekosistem Melakukan restorasi ekosistem yang terdegradasi dengan teknik berbasis teknologi, serta mendorong praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan untuk menjaga keanekaragaman hayati	
		Pengembangan Program Perhutanan Sosial Berkelanjutan dengan Fokus Meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan hutan berbasis sosial yang berkelanjutan. Mendorong masyarakat untuk mengelola hutan dengan praktik ramah lingkungan, seperti agroforestry, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan konservasi alam. Menyediakan akses pasar bagi produk-produk hutan berkelanjutan serta memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah	Pengembangan Program Perhutanan Sosial Berkelanjutan dengan Fokus Meningkatkan kapasitas masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan hutan berbasis sosial yang berkelanjutan. Mendorong masyarakat untuk mengelola hutan dengan praktik ramah lingkungan, seperti agroforestry, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, dan konservasi alam. Menyediakan akses pasar bagi produk-produk hutan berkelanjutan serta memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah	
		Pengembangan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi Mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, di sektor industri, perumahan, dan pertanian. Melakukan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi energi, termasuk mengganti lampu dan peralatan rumah tangga dengan teknologi hemat energi serta	Pengembangan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi Mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, di sektor industri, perumahan, dan pertanian. Melakukan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi energi, termasuk mengganti lampu dan peralatan rumah tangga dengan teknologi hemat energi serta	

		memperkenalkan sistem energi terbarukan berbasis komunitas di daerah-daerah terpencil.	memperkenalkan sistem energi terbarukan berbasis komunitas di daerah-daerah terpencil.	
		Implementasi Kebijakan Pengelolaan Emisi dan Pengurangan Sampah Menyusun kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ketat di sektor transportasi, industri, dan pertanian, serta mendorong transportasi umum yang ramah lingkungan. Selain itu, meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan mengutamakan daur ulang dan pengurangan sampah organik untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir (TPA)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Emisi dan Pengurangan Sampah Menyusun kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang ketat di sektor transportasi, industri, dan pertanian, serta mendorong transportasi umum yang ramah lingkungan. Selain itu, meningkatkan sistem pengelolaan sampah dengan mengutamakan daur ulang dan pengurangan sampah organik untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir (TPA)	
		Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, termasuk daur ulang dan pemanfaatan sampah organik, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan berbasis komunitas	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, termasuk daur ulang dan pemanfaatan sampah organik, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan berbasis komunitas	
		Penanganan Genangan dan Pengendalian Banjir Memperbaiki sistem drainase, membangun sumur resapan, dan melakukan penghijauan di daerah rawan banjir untuk mengurangi genangan air	Penanganan Genangan dan Pengendalian Banjir Memperbaiki sistem drainase, membangun sumur resapan, dan melakukan penghijauan di daerah rawan banjir untuk mengurangi genangan air	
		Penyusunan dan Implementasi Rencana Tata Ruang yang Berkelanjutan: Menyusun dan menerapkan rencana tata ruang yang berfokus pada pemanfaatan ruang yang efisien dan ramah lingkungan, dengan mengidentifikasi zona-zona yang harus dilindungi, seperti kawasan hutan lindung, lahan pertanian, dan sumber daya alam vital lainnya.	Penyusunan dan Implementasi Rencana Tata Ruang yang Berkelanjutan: Menyusun dan menerapkan rencana tata ruang yang berfokus pada pemanfaatan ruang yang efisien dan ramah lingkungan, dengan mengidentifikasi zona-zona yang harus dilindungi, seperti kawasan hutan lindung, lahan pertanian, dan sumber daya alam vital lainnya.	

		Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai: Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar aturan untuk memastikan kelestarian lingkungan terjaga.	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai: Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, termasuk pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar aturan untuk memastikan kelestarian lingkungan terjaga.	
		Pengaturan dan Pembagian Tanah yang Adil dan Berkelanjutan: Menyusun kebijakan yang memastikan distribusi tanah yang adil dan transparan, dengan prioritas pada pengakuan hak masyarakat lokal dan adat, serta mendorong penggunaan tanah untuk tujuan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan dan kawasan konservasi.	Pengaturan dan Pembagian Tanah yang Adil dan Berkelanjutan: Menyusun kebijakan yang memastikan distribusi tanah yang adil dan transparan, dengan prioritas pada pengakuan hak masyarakat lokal dan adat, serta mendorong penggunaan tanah untuk tujuan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pertanian berkelanjutan dan kawasan konservasi.	

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sigi tahun 2025-2029**

Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas, yang berisi program-program untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus memenuhi layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dokumen ini juga memuat target indikasi program dan pagu indikatif.

Indikasi program merupakan program yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2025–2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang dialokasikan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini.

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi beserta kerangka pendanaannya diuraikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Menurunkan Intensitas GRK menuju Net Zero Emission - Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Luas Genangan yang Tertangani	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Penurunan Intensitas GRK, dan Pengelolaan Sampah				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)		
					Penurunan intensitas emisi GRK ((%))		
					Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%)		
					Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun (Ton CO2 eq)		
					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))		
					Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%))		
		Meningkatnya Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi (Km2)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)		
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan		Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca			Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications (Dokumen)		
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan		Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
					Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
		Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.02.0007 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Persampahan			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)		
					Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. (Ton)		
					Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)		
			Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	
					jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.02.0007 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	
			Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH		Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup		Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
					Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			Persentase Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan (%)		
					Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.11.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.11.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.11.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

4.2. Uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi 2025-2029

Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas, yang berisi program-program untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dokumen ini juga memuat target indikasi program dan pagu indikatif.

Indikasi program merupakan program yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2025–2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini.

Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi beserta kerangka pendanaannya yang diuraikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				7.474.623.0 00,00		7.624.115.4 60,00		7.776.597.7 69,00		7.932.129.7 25,00		8.090.772.3 19,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.586.106.1 43,00		2.637.828.2 66,00		2.690.584.8 31,00		2.744.396.5 28,00		2.799.284.4 58,00		
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan				2.586.106.1 43,00		2.637.828.2 66,00		2.690.584.8 31,00		2.744.396.5 28,00		2.799.284.4 58,00	2.11.0.00.0.00. 01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				232.749.54 9,00		237.404.54 8,00		242.152.63 2,00		246.995.68 6,00		251.935.60 5,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	232.749.54 9,00	1	237.404.54 8,00	1	242.152.63 2,00	1	246.995.68 6,00	1	251.935.60 5,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penvusunan Dokumen	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)															
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1				1				1					1
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1				1				1					1
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1				1				1					1
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1				1				1					1
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1				1				1					1
	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.861.061,00				26.378.284,00					26.905.848,00
Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	1	25.861.061,00	1	26.378.284,00	1	26.905.848,00	1	27.443.966,00	1	27.992.845,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah (Dokumen)													
2.11.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25.861.061, 00		26.378.283, 00		26.905.848, 00		27.443.965, 00		27.992.845, 00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.861.061, 00	1	26.378.283, 00	1	26.905.848, 00	1	27.443.965, 00	1	27.992.845, 00		
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				25.861.061, 00		26.378.283, 00		26.905.848, 00		27.443.965, 00		27.992.845, 00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.861.061, 00	1	26.378.283, 00	1	26.905.848, 00	1	27.443.965, 00	1	27.992.845, 00		
2.11.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				25.861.061, 00		26.378.283, 00		26.905.848, 00		27.443.965, 00		27.992.845, 00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.861.061, 00	1	26.378.283, 00	1	26.905.848, 00	1	27.443.965, 00	1	27.992.845, 00		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.861.061, 00		26.378.283, 00		26.905.848, 00		27.443.965, 00		27.992.845, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	25.861.061,00	1	26.378.283,00	1	26.905.848,00	1	27.443.965,00	1	27.992.845,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.861.061,00		26.378.283,00		26.905.848,00		27.443.965,00		27.992.845,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	25.861.061,00	1	26.378.283,00	1	26.905.848,00	1	27.443.965,00	1	27.992.845,00		
2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				25.861.061,00		26.378.283,00		26.905.848,00		27.443.965,00		27.992.845,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	25.861.061,00	1	26.378.283,00	1	26.905.848,00	1	27.443.965,00	1	27.992.845,00		
2.11.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.861.061,00		26.378.283,00		26.905.848,00		27.443.965,00		27.992.845,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	25.861.061,00	1	26.378.283,00	1	26.905.848,00	1	27.443.965,00	1	27.992.845,00		
2.11.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan				25.861.061,00		26.378.283,00		26.905.848,00		27.443.965,00		27.992.845,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Selain Renstra PD dan Renja PD														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	25.861.061,00	1	26.378.283,00	1	26.905.848,00	1	27.443.965,00	1	27.992.845,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.324.775.197,00		1.351.670.698,00		1.379.104.115,00		1.407.086.190,00		1.435.627.916,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1.324.775.197,00	1	1.351.670.698,00	1	1.379.104.115,00	1	1.407.086.190,00	1	1.435.627.916,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	26		26									
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1				1				1			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				936.859.27 7,00		955.996.45 8,00		975.516.39 0,00		995.426.71 0,00		1.015.735.2 46,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	26	936.859.27 7,00	26	955.996.45 8,00		975.516.39 0,00		995.426.71 0,00		1.015.735.2 46,00		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				77.583.184, 00		79.134.848, 00		80.717.545, 00		82.331.896, 00		83.978.534, 00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	77.583.184, 00	1	79.134.848, 00	1	80.717.545, 00	1	82.331.896, 00	1	83.978.534, 00		
2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				77.583.184, 00		79.134.848, 00		80.717.545, 00		82.331.896, 00		83.978.534, 00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	77.583.184, 00	1	79.134.848, 00	1	80.717.545, 00	1	82.331.896, 00	1	83.978.534, 00		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				77.583.184, 00		79.134.848, 00		80.717.545, 00		82.331.896, 00		83.978.534, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	77.583.184,00	1	79.134.848,00	1	80.717.545,00	1	82.331.896,00	1	83.978.534,00		
2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				77.583.184,00		79.134.848,00		80.717.545,00		82.331.896,00		83.978.534,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	77.583.184,00	1	79.134.848,00	1	80.717.545,00	1	82.331.896,00	1	83.978.534,00		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				77.583.184,00		79.134.848,00		80.717.545,00		82.331.896,00		83.978.534,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	1	1	77.583.184,00	1	79.134.848,00	1	80.717.545,00	1	82.331.896,00	1	83.978.534,00		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				77.583.183,00		79.134.849,00		80.717.544,00		82.331.895,00		83.978.535,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	77.583.183,00	1	79.134.849,00	1	80.717.544,00	1	82.331.895,00	1	83.978.535,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.11.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				25.861.061, 00		26.378.283, 00		26.905.848, 00		27.443.965, 00		27.992.845, 00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	25.861.061, 00	1	26.378.283, 00	1	26.905.848, 00	1	27.443.965, 00	1	27.992.845, 00		
2.11.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.861.061, 00		26.378.283, 00		26.905.848, 00		27.443.965, 00		27.992.845, 00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.861.061, 00	1	26.378.283, 00	1	26.905.848, 00	1	27.443.965, 00	1	27.992.845, 00		
2.11.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.861.061, 00		26.378.283, 00		26.905.848, 00		27.443.965, 00		27.992.845, 00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	25.861.061, 00	1	26.378.283, 00	1	26.905.848, 00	1	27.443.965, 00	1	27.992.845, 00		
2.11.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				362.054.86 1,00		369.295.95 5,00		376.681.87 9,00		384.215.51 7,00		391.899.82 3,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	362.054.86 1,00	1	369.295.95 5,00	1	376.681.87 9,00	1	384.215.51 7,00	1	391.899.82 3,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1				1				1				
2.11.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				51.722.123,00		52.756.565,00		53.811.697,00		54.887.931,00		55.985.689,00			
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	51.722.123,00	1	52.756.565,00	1	53.811.697,00	1	54.887.931,00	1	55.985.689,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.04.0006 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				64.652.654, 00		65.945.707, 00		67.264.621, 00		68.609.913, 00		69.982.111, 00		
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	64.652.654, 00	1	65.945.707, 00	1	67.264.621, 00	1	68.609.913, 00	1	69.982.111, 00		
2.11.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				64.652.654, 00		65.945.707, 00		67.264.621, 00		68.609.913, 00		69.982.111, 00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	64.652.654, 00	1	65.945.707, 00	1	67.264.621, 00	1	68.609.913, 00	1	69.982.111, 00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				90.513.717, 00		92.323.987, 00		94.170.468, 00		96.053.881, 00		97.974.954, 00		
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	90.513.717, 00	1	92.323.987, 00	1	94.170.468, 00	1	96.053.881, 00	1	97.974.954, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.930.531,00		13.189.141,00		13.452.924,00		13.721.983,00		13.996.422,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	12.930.531,00	1	13.189.141,00	1	13.452.924,00	1	13.721.983,00	1	13.996.422,00		
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.930.531,00		13.189.141,00		13.452.924,00		13.721.983,00		13.996.422,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	12.930.531,00	1	13.189.141,00	1	13.452.924,00	1	13.721.983,00	1	13.996.422,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.930.531, 00		13.189.141, 00		13.452.924, 00		13.721.983, 00		13.996.422, 00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	12.930.531, 00	1	13.189.141, 00	1	13.452.924, 00	1	13.721.983, 00	1	13.996.422, 00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.930.531, 00		13.189.141, 00		13.452.924, 00		13.721.983, 00		13.996.422, 00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	12.930.531, 00	1	13.189.141, 00	1	13.452.924, 00	1	13.721.983, 00	1	13.996.422, 00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.930.531, 00		13.189.141, 00		13.452.924, 00		13.721.983, 00		13.996.422, 00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	12.930.531, 00	1	13.189.141, 00	1	13.452.924, 00	1	13.721.983, 00	1	13.996.422, 00		
2.11.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.930.531, 00		13.189.141, 00		13.452.924, 00		13.721.983, 00		13.996.422, 00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	12.930.531, 00	1	13.189.141, 00	1	13.452.924, 00	1	13.721.983, 00	1	13.996.422, 00		
2.11.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.930.531, 00		13.189.141, 00		13.452.924, 00		13.721.983, 00		13.996.422, 00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	12.930.531, 00	1	13.189.141, 00	1	13.452.924, 00	1	13.721.983, 00	1	13.996.422, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				206.888.49 2,00		211.026.26 0,00		215.246.78 8,00		219.551.72 4,00		223.942.75 6,00		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	206.888.49 2,00	1	211.026.26 0,00	1	215.246.78 8,00	1	219.551.72 4,00	1	223.942.75 6,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1				1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1				1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3				3		3		3			
2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	51.722.123, 00	3	52.756.565, 00	3	53.811.697, 00	3	54.887.931, 00	3	55.985.689, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				51.722.123, 00		52.756.565, 00		53.811.697, 00		54.887.931, 00		55.985.689, 00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	51.722.123, 00	1	52.756.565, 00	1	53.811.697, 00	1	54.887.931, 00	1	55.985.689, 00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155.166.36 8,00		158.269.69 6,00		161.435.08 8,00		164.663.79 2,00		167.957.06 8,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	155.166.36 8,00	1	158.269.69 6,00	1	161.435.08 8,00	1	164.663.79 2,00	1	167.957.06 8,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				38.791.592, 00		39.567.424, 00		40.358.772, 00		41.165.948, 00		41.989.267, 00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	38.791.592, 00	1	39.567.424, 00	1	40.358.772, 00	1	41.165.948, 00	1	41.989.267, 00		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.791.592, 00		39.567.424, 00		40.358.772, 00		41.165.948, 00		41.989.267, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	38.791.592,00	1	39.567.424,00	1	40.358.772,00	1	41.165.948,00	1	41.989.267,00		
2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.791.592,00		39.567.424,00		40.358.772,00		41.165.948,00		41.989.267,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	38.791.592,00	1	39.567.424,00	1	40.358.772,00	1	41.165.948,00	1	41.989.267,00		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				38.791.592,00		39.567.424,00		40.358.772,00		41.165.948,00		41.989.267,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	38.791.592,00	1	39.567.424,00	1	40.358.772,00	1	41.165.948,00	1	41.989.267,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.722.122,00		72.756.566,00		73.811.696,00		74.887.930,00		75.985.690,00		
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	71.722.122,00	1	72.756.566,00	1	73.811.696,00	1	74.887.930,00	1	75.985.690,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.861.061,00		26.378.283,00		26.905.848,00		27.443.965,00		27.992.845,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	25.861.061,00	1	26.378.283,00	1	26.905.848,00	1	27.443.965,00	1	27.992.845,00		
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.861.061,00		26.378.283,00		26.905.848,00		27.443.965,00		27.992.845,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	25.861.061,00	1	26.378.283,00	1	26.905.848,00	1	27.443.965,00	1	27.992.845,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Mitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	70	70	300.000.00 0,00	75	306.000.00 0,00	80	312.120.00 0,00	85	318.362.40 0,00	90	324.729.64 8,00		
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	1	300.000.00 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	1	300.000.00 0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1	0	0,00	1	306.000.00 0,00	1	312.120.00 0,00	0	318.362.40 0,00	1	324.729.64 8,00		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	0	0		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)													
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0,00		0,00		0,00		318.362.40 0,00		0,00		
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	318.362.40 0,00	0	0,00		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		0,00		324.729.64 8,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	1	0	0,00	1	306.000.00 0,00	1	312.120.00 0,00	0	0,00	1	324.729.64 8,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53	53,1	300.000.00 0,00	53,2	306.000.00 0,00	53,3	312.120.00 0,00	53,4	318.362.40 0,00	53,5	324.729.64 8,00		
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	97,48	94,05		94,1		94,17		94,2		94,25			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				285.000.00 0,00		290.700.00 0,00		296.514.00 0,00		302.444.28 0,00		308.493.16 6,00		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	285.000.00 0,00	1	290.700.00 0,00	1	296.514.00 0,00	1	302.444.28 0,00	1	308.493.16 6,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	22	22		22		22		22		22			
	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	0	1		1		1		1					
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	11	11		11		11		11					
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	1		1		1		1					
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				30.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.965,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.600.000,00	1	31.212.000,00	1	31.836.240,00	1	32.472.965,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				60.000.000, 00		61.200.000, 00		62.424.000, 00		63.672.480, 00		64.945.930, 00		
Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	11	11	60.000.000, 00	11	61.200.000, 00	11	62.424.000, 00	11	63.672.480, 00	11	64.945.930, 00		
2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan				30.000.000, 00		30.600.000, 00		31.212.000, 00		31.836.240, 00		32.472.965, 00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	0	1	30.000.000, 00	1	30.600.000, 00	1	31.212.000, 00	1	31.836.240, 00	1	32.472.965, 00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				90.000.000, 00		91.800.000, 00		93.636.000, 00		95.508.720, 00		97.418.894, 00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1	1	90.000.000, 00	1	91.800.000, 00	1	93.636.000, 00	1	95.508.720, 00	1	97.418.894, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				75.000.000, 00		76.500.000, 00		78.030.000, 00		79.590.600, 00		81.182.412, 00		
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	22	22	75.000.000, 00	22	76.500.000, 00	22	78.030.000, 00	22	79.590.600, 00	22	81.182.412, 00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				15.000.000, 00		15.300.000, 00		15.606.000, 00		15.918.120, 00		16.236.482, 00		
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1	15.000.000, 00	1	15.300.000, 00	1	15.606.000, 00	1	15.918.120, 00	1	16.236.482, 00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				15.000.000, 00		15.300.000, 00		15.606.000, 00		15.918.120, 00		16.236.482, 00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	1	1	15.000.000, 00	1	15.300.000, 00	1	15.606.000, 00	1	15.918.120, 00	1	16.236.482, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dilaksanakan (Laporan)													
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	5	8	300.000.00 0,00	9	306.000.00 0,00	10	312.120.00 0,00	11	318.362.40 0,00	12	324.729.64 8,00		
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	1	300.000.00 0,00	1	306.000.00 0,00	1	312.120.00 0,00	1	318.362.40 0,00	1	324.729.64 8,00		
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan				75.000.000, 00		76.500.000, 00		78.030.000, 00		79.590.600, 00		81.182.412, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keanekaragaman Hayati														
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0	1	75.000.000,00	1	76.500.000,00	1	78.030.000,00	1	79.590.600,00	1	81.182.412,00		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				90.000.000,00		91.800.000,00		93.636.000,00		95.508.720,00		97.418.894,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	4	4	90.000.000,00	4	91.800.000,00	4	93.636.000,00	4	95.508.720,00	4	97.418.894,00		
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				45.000.000,00		45.900.000,00		46.818.000,00		47.754.360,00		48.709.447,00		
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	0	2	45.000.000,00	2	45.900.000,00	2	46.818.000,00	2	47.754.360,00	2	48.709.447,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				90.000.000,00		91.800.000,00		93.636.000,00		95.508.720,00		97.418.895,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0	1	90.000.000,00	1	91.800.000,00	1	93.636.000,00	1	95.508.720,00	1	97.418.895,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	38	75	300.000.00 0,00	75	306.000.00 0,00	80	312.120.00 0,00	80	318.362.40 0,00	80	324.729.64 8,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	7	8	300.000.00 0,00	8	306.000.00 0,00	9	312.120.00 0,00	9	318.362.40 0,00	10	324.729.64 8,00		
	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	0	2		2		2		2					
	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1	1		1		1		1					
2.11.05.2.02.0003 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota				135.000.00 0,00		137.700.00 0,00		140.454.00 0,00		143.263.08 0,00		146.128.34 2,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1	1	135.000.00 0,00	1	137.700.00 0,00	1	140.454.00 0,00	1	143.263.08 0,00	1	146.128.34 2,00		
2.11.05.2.02.0004 - Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				82.500.000, 00		84.150.000, 00		85.833.000, 00		87.549.660, 00		89.300.653, 00		
terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina (Usaha)	0	2	82.500.000, 00	2	84.150.000, 00	2	85.833.000, 00	2	87.549.660, 00	2	89.300.653, 00		
2.11.05.2.02.0007 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3				82.500.000, 00		84.150.000, 00		85.833.000, 00		87.549.660, 00		89.300.653, 00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	7	8	82.500.000, 00	8	84.150.000, 00	9	85.833.000, 00	9	87.549.660, 00	10	89.300.653, 00		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	70	70	300.000.00 0,00	75	306.000.00 0,00	80	312.120.00 0,00	85	318.362.40 0,00	90	324.729.64 8,00		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	85	406	300.000.00 0,00	406	306.000.00 0,00	406	312.120.00 0,00	406	318.362.40 0,00	406	324.729.64 8,00		
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	1		1		1		1		1			
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				150.000.00 0,00		153.000.00 0,00		156.060.00 0,00		159.181.20 0,00		162.364.82 4,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	1	150.000.00 0,00	1	153.000.00 0,00	1	156.060.00 0,00	1	159.181.20 0,00	1	162.364.82 4,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				150.000.00 0,00		153.000.00 0,00		156.060.00 0,00		159.181.20 0,00		162.364.82 4,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	85	406	150.000.00 0,00	406	153.000.00 0,00	406	156.060.00 0,00	406	159.181.20 0,00	406	162.364.82 4,00		
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	20	300.000.00 0,00	30	306.000.00 0,00	40	312.120.00 0,00	50	318.362.40 0,00	60	324.729.64 8,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				120.000.00 0,00		122.400.00 0,00		124.848.00 0,00		127.344.96 0,00		129.891.85 9,00		
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1	1	120.000.00 0,00	1	122.400.00 0,00	1	124.848.00 0,00	1	127.344.96 0,00	1	129.891.85 9,00		
2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				120.000.00 0,00		122.400.00 0,00		124.848.00 0,00		127.344.96 0,00		129.891.85 9,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	1	1	120.000.00 0,00	1	122.400.00 0,00	1	124.848.00 0,00	1	127.344.96 0,00	1	129.891.85 9,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)													
2.11.07.2.02 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				180.000.00 0,00		183.600.00 0,00		187.272.00 0,00		191.017.44 0,00		194.837.78 9,00		
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	1	1	180.000.00 0,00	1	183.600.00 0,00	1	187.272.00 0,00	1	191.017.44 0,00	1	194.837.78 9,00		
2.11.07.2.02.0001 - Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				180.000.00 0,00		183.600.00 0,00		187.272.00 0,00		191.017.44 0,00		194.837.78 9,00		
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan	1	1	180.000.00 0,00	1	183.600.00 0,00	1	187.272.00 0,00	1	191.017.44 0,00	1	194.837.78 9,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)													
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				500.000.00 0,00		510.000.00 0,00		520.200.00 0,00		530.604.00 0,00		541.216.08 0,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	50	500.000.00 0,00	55	510.000.00 0,00	60	520.200.00 0,00	65	530.604.00 0,00	70	541.216.08 0,00		
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.00 0,00		510.000.00 0,00		520.200.00 0,00		530.604.00 0,00		541.216.08 0,00		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0	4	500.000.00 0,00	5	510.000.00 0,00	6	520.200.00 0,00	7	530.604.00 0,00	8	541.216.08 0,00		
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	13	18		25		25		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				150.000.00 0,00		153.000.00 0,00		156.060.00 0,00		159.181.20 0,00		162.364.82 4,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	1	150.000.00 0,00	1	153.000.00 0,00	1	156.060.00 0,00	1	159.181.20 0,00	1	162.364.82 4,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				150.000.00 0,00		153.000.00 0,00		156.060.00 0,00		159.181.20 0,00		162.364.82 4,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	0	4	150.000.00 0,00	5	153.000.00 0,00	6	156.060.00 0,00	7	159.181.20 0,00	8	162.364.82 4,00		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat				200.000.00 0,00		204.000.00 0,00		208.080.00 0,00		212.241.60 0,00		216.486.43 2,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	13	18	200.000.00 0,00	25	204.000.00 0,00	25	208.080.00 0,00	30	212.241.60 0,00	30	216.486.43 2,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	40	300.000.00 0,00	45	306.000.00 0,00	55	312.120.00 0,00	60	318.362.40 0,00	65	324.729.64 8,00		
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	1	300.000.00 0,00	1	306.000.00 0,00	1	312.120.00 0,00	1	318.362.40 0,00	1	324.729.64 8,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	1	1	300.000.00 0,00	1	306.000.00 0,00	1	312.120.00 0,00	1	318.362.40 0,00	1	324.729.64 8,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	50	300.000.00 0,00	55	306.000.00 0,00	60	312.120.00 0,00	65	318.362.40 0,00	70	324.729.64 8,00		
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	5	8	300.000.00 0,00	9	306.000.00 0,00	10	312.120.00 0,00	11	318.362.40 0,00	12	324.729.64 8,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)													
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				300.000.00 0,00		306.000.00 0,00		312.120.00 0,00		318.362.40 0,00		324.729.64 8,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	5	8	300.000.00 0,00	9	306.000.00 0,00	10	312.120.00 0,00	11	318.362.40 0,00	12	324.729.64 8,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				1.988.516.8 57,00		2.028.287.1 94,00		2.068.852.9 38,00		2.110.229.9 97,00		2.152.434.5 97,00		
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	45	1.988.516.8 57,00	50	2.028.287.1 94,00	55	2.068.852.9 38,00	60	2.110.229.9 97,00	65	2.152.434.5 97,00		
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				1.988.516.8 57,00		2.028.287.1 94,00		2.068.852.9 38,00		2.110.229.9 97,00		2.152.434.5 97,00		
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0	13,36	1.988.516.8 57,00	14,03	2.028.287.1 94,00	14,73	2.068.852.9 38,00	15,47	2.110.229.9 97,00	16,24	2.152.434.5 97,00		
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan	0	1		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN				
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)																	
	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	10	11				11				12					12		13
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0	2				4				4					4		5
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	41,33				43,40				45,57					47,85		50,24
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	4.393,35	4.843,67				5.085,85				5.085,85					5.607,15		5.887,51
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	10.402,5	13.000		15.000		17.000		19.000		21.000							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				39.770.340,00		60.848.628,00		62.065.591,00		63.306.903,00		64.573.050,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	0	2	39.770.340,00	4	60.848.628,00	4	62.065.591,00	4	63.306.903,00	5	64.573.050,00		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				298.277.528,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	0	1	298.277.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah				397.703.371,00		507.071.789,00		517.213.234,00		527.557.499,00		538.108.649,00		
Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	10	11	397.703.371,00	11	507.071.789,00	12	517.213.234,00	12	527.557.499,00	13	538.108.649,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				318.162.69 7,00		425.940.31 0,00		434.459.11 6,00		443.148.29 9,00		452.011.25 6,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	10.402,5	13.000	318.162.69 7,00	15.000	425.940.31 0,00	17.000	434.459.11 6,00	19.000	443.148.29 9,00	21.000	452.011.25 6,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				298.277.52 8,00		202.828.71 9,00		206.885.29 3,00		211.022.99 9,00		215.243.45 9,00		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0	13,36	298.277.52 8,00	14,03	202.828.71 9,00	14,73	206.885.29 3,00	15,47	211.022.99 9,00	16,24	215.243.45 9,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				119.311.01 1,00		162.262.97 5,00		165.508.23 5,00		168.818.39 9,00		172.194.76 7,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	4.393,35	4.843,67	119.311.01 1,00	5.085,85	162.262.97 5,00	5.085,85	165.508.23 5,00	5.607,15	168.818.39 9,00	5.887,51	172.194.76 7,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				119.311.01 1,00		162.262.97 5,00		165.508.23 5,00		168.818.39 9,00		172.194.76 7,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/k ota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	41,33	119.311.01 1,00	43,40	162.262.97 5,00	45,57	165.508.23 5,00	47,85	168.818.39 9,00	50,24	172.194.76 7,00		
2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah				397.703.37 1,00		507.071.79 8,00		517.213.23 4,00		527.557.49 9,00		538.108.64 9,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	0	1	397.703.37 1,00	1	507.071.79 8,00	1	517.213.23 4,00	1	527.557.49 9,00	1	538.108.64 9,00		

Tabel 4.3 Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7.474.623.000,0 0		7.624.115.460,0 0		7.776.597.769,0 0		7.932.129.725,0 0		8.090.772.319,0 0	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.586.106.143,0 0		2.637.828.266,0 0		2.690.584.831,0 0		2.744.396.528,0 0		2.799.284.458,0 0	
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan					2.586.106.143,0 0		2.637.828.266,0 0		2.690.584.831,0 0		2.744.396.528,0 0		2.799.284.458,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	70	70	70	300.000.000,00	75	306.000.000,00	80	312.120.000,00	85	318.362.400,00	90	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53	53	53,1	300.000.000,00	53,2	306.000.000,00	53,3	312.120.000,00	53,4	318.362.400,00	53,5	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	97,48	93,93	94,05		94,1		94,17		94,2		94,25		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	5	8	8	300.000.000,00	9	306.000.000,00	10	312.120.000,00	11	318.362.400,00	12	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	38	75	75	300.000.000,00	75	306.000.000,00	80	312.120.000,00	80	318.362.400,00	80	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%)	70	70	70	300.000.000,00	75	306.000.000,00	80	312.120.000,00	85	318.362.400,00	90	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	20	20	300.000.000,00	30	306.000.000,00	40	312.120.000,00	50	318.362.400,00	60	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					500.000.000,00		510.000.000,00		520.200.000,00		530.604.000,00		541.216.080,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	50	50	500.000.000,00	55	510.000.000,00	60	520.200.000,00	65	530.604.000,00	70	541.216.080,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	0	40	40	300.000.000,00	45	306.000.000,00	55	312.120.000,00	60	318.362.400,00	65	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	0	50	50	300.000.000,00	55	306.000.000,00	60	312.120.000,00	65	318.362.400,00	70	324.729.648,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

	Lingkungan Hidup (Persentase)													
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.988.516.857,0 0		2.028.287.194,0 0		2.068.852.938,0 0		2.110.229.997,0 0		2.152.434.597,0 0	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	40	45	1.988.516.857,0 0	50	2.028.287.194,0 0	55	2.068.852.938,0 0	60	2.110.229.997,0 0	65	2.152.434.597,0 0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
TOTAL KESELURUHAN					7.474.623.000.0 0		7.624.115.460.0 0		7.776.597.769.0 0		7.932.129.725.0 0		8.090.772.319.0 0	

4.3. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.4 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah PD Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
1	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.03.2.01.0008 - Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
2	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 8
			2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 8

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
3	2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	2.11.07.2.01 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 7
			2.11.07.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 7
4	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 6
			2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 6

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
			2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 6
5	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 6
			2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 6
6	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
			2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5
			2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Asta Cita Nomor 11, Program Prioritas Pembangunan Daerah Nomor 5

4.4.Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya dalam bidang lingkungan hidup.

Indikator Kinerja daerah disusun untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian.

Keberadaan indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya IKD, diharapkan pencapaian visi pembangunan lingkungan hidup dapat lebih jelas, terarah, terukur, serta akuntabel sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2030. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup oleh DLH Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	%	28	29,05	31	33	33,88	34	
3	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	32	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33	
4	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Ton CO2 eq	565.655,11	632.143,26	709.986,93	798.376,67	884.431,12	980.969,4	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	39,36	41,33	43,4	45,57	47,85	50,24	
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	12,73	13,36	14,03	14,73	15,47	16,24	
7	Persentase Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
8	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Km2	0	0	0	0	0	0	
9	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang	Dokumen	0	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications								
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	35	40	45	50	55	60	
11	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	7900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	
12	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	22	20	25	30	35	40	
13	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	39	41	43	45	47	49	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi Tahun 2025–2030 mencakup tiga indikator utama, yaitu penurunan intensitas gas rumah kaca (GRK), penghargaan Adipura, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penurunan intensitas GRK mengukur keberhasilan pengurangan emisi GRK yang dihasilkan di Kabupaten Sigi. Penghargaan Adipura menjadi target pencapaian

prestasi pengelolaan lingkungan, sedangkan IKLH digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sigi pada periode tertentu. IKLH merupakan nilai komposit dari gabungan beberapa indeks, seperti indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan.

Tabel berikut menyajikan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan setiap tahun terjadi peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi
Tahun 2025–2030

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	%	28	29,05	31	33	33,88	34	
3	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	%	32	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33	
4	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Ton CO ₂ eq	565.655,11	632.143,26	709.986,93	798.376,67	884.431,12	980.969,4	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	39,36	41,33	43,4	45,57	47,85	50,24	
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	12,73	13,36	14,03	14,73	15,47	16,24	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan responsif terhadap perubahan iklim serta degradasi lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sigi menetapkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terukur dan relevan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan lingkungan hidup dapat dipantau, dievaluasi, dan diarahkan secara strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, terutama dalam aspek pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Penetapan target IKK ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan daerah, memperhatikan kondisi aktual lingkungan di Kabupaten Sigi, serta sinergi dengan agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Target ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan DLH selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah.

Adapun target kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup oleh DLH Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	%	28	29,05	31	33	33,88	34	
3	Persentase Penurunan	%	32	32,64	33,29	33,96	34,64	35,33	

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Emisi GRK (Tahunan)								
4	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Ton CO2 eq	565.655,11	632.143,26	709.986,93	798.376,67	884.431,12	980.969,4	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	39,36	41,33	43,4	45,57	47,85	50,24	
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	12,73	13,36	14,03	14,73	15,47	16,24	
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	%	35	40	45	50	55	60	
8	Luas kawasan situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi	Km2	0	0	0	0	0	0	
9	Persentase Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
10	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Dokumen	0	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Ton	7900	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900	
12	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	22	20	25	30	35	40	
14	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase	39	41	43	45	47	49	

BAB V

PENUTUP

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang berkualitas, yang mencerminkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dan menjamin transparansi. Perencanaan sebagai proses awal pelaksanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Di sisi lain, untuk mewujudkan perencanaan yang memenuhi kriteria tersebut masih terkendala oleh kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat perencana. Oleh karena itu, konsolidasi internal Dinas Lingkungan Hidup yang berkesinambungan sangat diperlukan.

Semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi ini dapat menggambarkan serta menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan, yaitu:

“KABUPATEN SIGI MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”.

Sigi, 30 September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

MOHAMAD AFIT, ST. M.Si,
Pembina Utama Madya. IV/c
NIP. 19671211 199103 1 010

